BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah ancuan bagi penulis dalam melakukan penelitian, sehingga dapat memperkarya teori yang digunakan untuk mengaji penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang dipandang memiliki relevansi dengan penelitian ini sebagai yang dipaparkan dan disajikan berikut.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI, JUDUL dan TAHUN	HASIL DAN ANALISIS	
		METODE dan HASIL	PERBEDAAN dan PERSAMAAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nanang Bagus (2021). *Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 10 No. 2.	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik purposive sampling. Informan meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, sedangkan analisis data melalui reduksi data, penyajian	Dalam penelitian Nanang Bagus (2021), fokus penelitian terletak pada strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menekankan pada peran pemerintah dalam menciptakan partisipasi melalui berbagai strategi

NO	PENELITI, JUDUL dan TAHUN	HASIL DAN ANALISIS	
		METODE dan HASIL	**PERBEDAAN dan PERSAMAAN**
(1)	(2)	(3)	(4)
		data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah Desa Landungsari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, pendampingan, pemberian ruang partisipasi (seperti musyawarah desa), serta membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan dalam pengambilan keputusan, identifikasi masalah, serta evaluasi program. Faktor pendukung meliputi tingginya usia produktif, kualitas SDM, dan adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya	seperti pemberdayaan dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan partisipasi sangat dipengaruhi oleh strategi pemerintah dan faktor sosial masyarakat. Sedangkan dalam penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (Studi di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu), fokus penelitian lebih diarahkan pada bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, namun lebih menitikberatkan

NO	PENELITI, JUDUL dan TAHUN	HASIL DAN ANALISIS	
		METODE dan HASIL	**PERBEDAAN dan PERSAMAAN**
(1)	(2)	(3)	(4)
		kesadaran masyarakat, perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan, serta kecenderungan mementingkan kepentingan pribadi.	pada keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan program, bukan pada strategi pemerintah. Persamaannya terletak pada sama-sama membahas partisipasi masyarakat dan menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, yaitu strategi pemerintah (penelitian ini) dan pelaksanaan partisipasi masyarakat (penelitian pembanding).
2	Roro Merry Chornelia Wulandari & Alfridus Ariyanto Dara Mone (2022). Upaya Partisipasi Masyarakat sebagai Kemandirian Ekonomi Desa Menghadapi Covid-19 Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo,	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik snowball sampling. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian	Dalam penelitian Wulandari & Mone (2022), fokus penelitian terletak pada upaya partisipasi masyarakat dalam mencapai kemandirian ekonomi desa di masa pandemi Covid-19. Penelitian

NO	PENELITI, JUDUL dan TAHUN	HASIL DAN ANALISIS	
		METODE dan HASIL	**PERBEDAAN dan PERSAMAAN**
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kota Batu. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 11 No. 2.	menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 berperan penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Bentuk partisipasi meliputi partisipasi mental, emosional, dan fisik. Masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti pengelolaan kebun bunga, penjualan hasil pertanian secara online, serta pemanfaatan fasilitas desa seperti koperasi dan wifi desa. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Faktor pendukung meliputi transparansi pemerintah desa, kerjasama masyarakat, serta fasilitas yang memadai. Sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya inisiatif sebagian masyarakat dan keterbatasan SDM. Secara keseluruhan,	ini menekankan pada peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan adaptasi terhadap kondisi krisis. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan hasil yang menunjukkan adanya peningkatan kemandirian ekonomi melalui inovasi dan partisipasi masyarakat. Sedangkan dalam penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (Studi di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu), fokus penelitian lebih pada keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa secara umum, bukan dalam konteks pandemi. Persamaannya

NO	PENELITI, JUDUL dan TAHUN	HASIL DAN ANALISIS	
		METODE dan HASIL	**PERBEDAAN dan PERSAMAAN**
(1)	(2)	(3)	(4)
		partisipasi masyarakat mampu meningkatkan kemandirian ekonomi desa di tengah krisis pandemi.	terletak pada sama-sama membahas partisipasi masyarakat dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada konteks penelitian (pandemi Covid-19 dan kemandirian ekonomi vs pelaksanaan program pemberdayaan desa) serta fokus hasil (ekonomi desa vs proses partisipasi pembangunan).
3	Agung Suprojo (2019). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8 No. 4.	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi (wawancara, observasi, dokumentasi) dan analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Informan dipilih dengan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tlekung memiliki lima peran utama dalam	Dalam penelitian Agung Suprojo (2019), fokus penelitian terletak pada peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa. Penelitian ini menekankan bagaimana pemerintah desa berfungsi sebagai fasilitator,

NO	PENELITI, JUDUL dan TAHUN	HASIL DAN ANALISIS	
		METODE dan HASIL	**PERBEDAAN dan PERSAMAAN**
(1)	(2)	(3)	(4)
		pengembangan BUMDes, yaitu sebagai fasilitator, pemberi pendampingan (mentoring dan coaching), pendukung kegiatan dan penganggaran, pemberi sosialisasi kepada masyarakat, serta pendorong kerjasama dengan pihak ketiga. BUMDes berfungsi sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha simpan pinjam dan pengembangan usaha produktif. Faktor pendukung meliputi tersedianya sarana prasarana, kebijakan pengelolaan yang jelas, pembinaan dan pengawasan rutin, bantuan dana hibah, serta kerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengembalian pinjaman, serta keterbatasan kemampuan pengurus	pendamping, dan penggerak dalam pengelolaan usaha ekonomi desa. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan hasil yang menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah desa dan dukungan kelembagaan. Sedangkan dalam penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (Studi di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu), fokus penelitian lebih pada keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas

NO	PENELITI, JUDUL dan TAHUN	HASIL DAN ANALISIS	
		METODE dan HASIL	**PERBEDAAN dan PERSAMAAN**
(1)	(2)	(3)	(4)
		dalam pengelolaan keuangan.	pembangunan desa. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yaitu peran pemerintah desa dalam pengelolaan ekonomi (BUMDes) pada penelitian ini, sedangkan penelitian pembanding lebih menekankan pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan

2.2 Teori Partisipasi Masyarakat

2.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek kunci dalam setiap upaya program pengembangan atau pemberdayaan masyarakat. Istilah partisipasi berasal dari bahasa Latin "*participare*," yang memiliki makna serupa dengan peran serta, keterlibatan, atau ikut serta dalam proses pembelajaran bersama, yang mencakup pemahaman, analisis, perencanaan, serta pelaksanaan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. Secara umum, pengertian partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan adalah keterlibatan seluruh anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk berperan dalam pengambilan keputusan selama proses

perencanaan dan pengelolaan pembangunan, termasuk di dalamnya penentuan rencana, pelaksanaan kegiatan, serta penentuan manfaat yang akan diperoleh.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, sangatlah penting bagi pemerintah untuk memberikan dorongan serta fasilitasi yang memadai agar masyarakat dapat termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutrisno (2020:87) yang menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui beberapa aspek sebagai berikut:

a) Partisipasi berarti keterlibatan bersama dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan secara gotong royong dan bahu-membahu oleh seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
b) Partisipasi juga dimaknai sebagai kerja kolektif untuk mencapai tujuan bersama di antara warga negara yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan keyakinan yang beragam, namun memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun kehidupan bangsa yang berkeadilan dan berdaya saing.
c) Partisipasi tidak hanya sebatas keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, tetapi juga mencakup kontribusi pemikiran, gagasan, dan sumber daya agar pembangunan yang dijalankan tetap berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan.
d) Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong terciptanya pembangunan yang humanis dan berkelanjutan, yakni pembangunan yang menghormati martabat manusia, menegakkan keadilan sosial, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup demi kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Menurut Fahik, Mbiri, dan Seran, (2024:87) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hingga evaluasi hasil-hasil pembangunan, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku yang ikut menikmati serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung

solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan menurut Yakobus Fahik, Adeodata L.C.B. Mbiri & Remigius Seran, (2024: 66) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai "keterlibatan aktif masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hingga evaluasi hasil-hasil pembangunan di mana masyarakat bertindak secara sukarela, tanpa tekanan eksternal yang dominan, dan mempertahankan rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap program yang dijalankan,

Menurut Dwi Iriani Margayaningsih (2024:1255), partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan yang berkelanjutan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga evaluasi hasil-hasil pembangunan. Partisipasi dipandang sebagai media untuk menumbuhkan kohesivitas sosial antarwarga, mempererat hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, serta membangun rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program yang dilaksanakan. Dalam perkembangan saat ini, partisipasi menjadi konsep kunci dalam setiap program pembangunan masyarakat dan dianggap sebagai paradigma baru yang harus melekat dalam setiap kebijakan publik. Namun, dalam praktiknya, partisipasi seringkali hanya menjadi slogan yang

banyak diucapkan tetapi kurang diterapkan secara nyata, sehingga maknanya mulai kehilangan esensi. Partisipasi sejatinya bermakna peran serta dan keterlibatan bersama dalam memahami, merencanakan, menganalisis, dan melaksanakan tindakan kolektif oleh masyarakat sebagai subjek pembangunan yang sadar, mandiri, dan berorientasi pada keberlanjutan.

2.2.2 Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat

Dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi, partisipasi masyarakat merupakan elemen fundamental yang berperan dalam menjamin keberlanjutan serta efektivitas program pembangunan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk dukungan terhadap program, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, berbagai studi akademis telah mengklasifikasikan partisipasi masyarakat berdasarkan dimensi tertentu guna memahami dinamika keterlibatan tersebut sekaligus menjadi landasan dalam merancang intervensi pembangunan yang inklusif.

Salah satu pendekatan awal dikemukakan oleh Sari dan Budi (2021) yang mengklasifikasikan partisipasi masyarakat ke dalam dua bentuk berdasarkan tingkat keterlibatan individu, yaitu partisipasi langsung dan tidak langsung. Partisipasi langsung merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, seperti menyampaikan pendapat, terlibat dalam diskusi, serta memberikan tanggapan terhadap kebijakan. Sebaliknya, partisipasi tidak langsung

terjadi ketika masyarakat mendelegasikan keterlibatannya kepada perwakilan tertentu, misalnya melalui mekanisme perwakilan dalam forum formal.

Selanjutnya, Rani dan Putri (2022) mengembangkan klasifikasi partisipasi berdasarkan tahapan dalam proses pembangunan, yang meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan. Pendekatan ini menekankan bahwa partisipasi masyarakat harus berlangsung secara berkelanjutan sejak tahap awal hingga implementasi program. Pengembangan lebih lanjut dilakukan oleh Ahmad et al. (2023) yang membagi partisipasi masyarakat ke dalam empat tahapan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Klasifikasi ini menegaskan bahwa partisipasi merupakan suatu siklus yang utuh dan saling berkaitan, bukan sekadar keterlibatan pada tahap tertentu saja.

Sejalan dengan kerangka tersebut, Cohen dan Uphoff (1980) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat diukur melalui empat dimensi utama, yang kemudian dipertegas kembali oleh Rohim dan Hidayat (2021:88) dalam konteks pemberdayaan desa. Keempat dimensi ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat dijadikan indikator operasional dalam menilai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan Desa . Keempat indikator tersebut sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi tersebut mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan, penetapan prioritas pembangunan, serta penyampaian aspirasi dan ide melalui forum-forum musyawarah desa. Melalui keterlibatan

dalam pengambilan keputusan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengemukakan kepentingan dan pandangannya terkait arah pembangunan.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Program

Tahap ini menitikberatkan pada partisipasi masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan teknis pembangunan, meliputi pengerjaan proyek infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta penyelenggaraan kegiatan sosial. Bentuk partisipasi tersebut tidak terbatas pada tenaga, melainkan juga mencakup pemikiran, waktu, dan kontribusi material.

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Pada tahap ini, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan serta mengelola hasil pembangunan secara optimal, adil, dan berkelanjutan demi kepentingan bersama. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat menginternalisasi manfaat program pemberdayaan ke dalam aspek sosial dan ekonomi kehidupannya.

4. Partisipasi dalam Evaluasi Program

Tahap evaluasi merupakan suatu proses krusial dalam menilai keberhasilan, efektivitas, serta dampak dari program pemberdayaan yang telah dijalankan. Masyarakat tidak sekadar menjadi penerima hasil evaluasi, melainkan juga berperan aktif dalam memberikan umpan balik, kritik, serta saran terkait pelaksanaan program tersebut.

2.2.3 Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal. Ada tiga alasan utama yang mendasari pentingnya partisipasi ini (mengutip Margayaningsih, (2024:1255). Pertama, partisipasi menjadi alat yang efektif untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi sosial, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat. Melalui keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, pemerintah dapat memahami situasi lokal secara lebih mendalam sehingga kebijakan dan program pembangunan dapat tepat sasaran. Kedua, keterlibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan hingga pelaksanaan mampu meningkatkan rasa percaya, menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*), serta memunculkan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program pembangunan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama yang berkontribusi pada keberlanjutan hasil pembangunan. Ketiga, partisipasi merupakan hak demokratis warga untuk ikut menentukan arah dan kebijakan pembangunan di wilayahnya. Oleh karena itu, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus tujuan utama pembangunan agar tercipta proses pembangunan yang adil, transparan, dan berkelanjutan (mengutip Taurista & Choiriyah, 2024:77). Partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam seluruh tahap siklus pembangunan desa, dan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pelaku aktif. Keterlibatan ini memiliki dua fungsi utama: pertama, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi akurat mengenai masalah dan potensi lokal (assessment),

sehingga program yang dirumuskan dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kedua, sebagai proses kolaboratif dalam pemecahan masalah dan seleksi solusi oleh masyarakat. Partisipasi yang autentik dan menyeluruh akan secara langsung meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, menjamin tanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan, serta memastikan keberlanjutan program di masa yang akan datang. Dengan cara ini, masyarakat dianggap sebagai subjek utama dalam pembangunan, bukan sekadar objek yang menerima hasil akhir.

Berdasarkan berbagai teori yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif, sukarela, dan sadar dari seluruh lapisan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan. Partisipasi mencakup tahap identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga evaluasi hasil pembangunan. Konsep ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk keikutsertaan secara fisik atau material, tetapi juga sebagai wujud kontribusi pemikiran, gagasan, dan tanggung jawab moral masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat juga dapat dipahami sebagai bentuk kesadaran kolektif masyarakat dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan di lingkungannya. Melalui keterlibatan aktif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil pembangunan yang dicapai.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan salah satu pondasi utama bagi terwujudnya pembangunan yang efektif, humanis, dan berkelanjutan. Partisipasi yang nyata dan menyeluruh dapat memperkuat kohesi sosial, meningkatkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, serta mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga dan melanjutkan hasil-hasil pembangunan. Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat memiliki peran strategis sebagai sarana pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada potensi lokal dan berprinsip pada keberlanjutan.

2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi masyarakat

Berdasarkan kajian literatur kontemporer, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk Corporate Social Responsibility (CSR), dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam individu maupun dari lingkungan eksternal. Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan aspek yang berasal dari dalam diri individu atau masyarakat, yang meliputi karakteristik personal, motivasi, dan kemampuan. Karakteristik personal seperti usia, pendidikan, pendapatan, dan jenis pekerjaan berperan dalam menentukan kesiapan dan kapasitas individu untuk berpartisipasi.

Pendidikan, misalnya, berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan memahami informasi, berkomunikasi, serta merespons perkembangan teknologi, sebagaimana ditegaskan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2022). Selain itu, motivasi individu juga menjadi faktor penting yang mendorong keterlibatan, baik yang bersumber dari harapan memperoleh manfaat ekonomi maupun sosial, maupun dari dorongan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, afiliasi, dan pencapaian. Penelitian oleh *United Nations Development Programme* (2022) menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap program serta kepercayaan terhadap penyelenggara dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. Di samping itu, kemampuan individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman juga menentukan kualitas partisipasi, di mana peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan edukasi terbukti mampu mendorong keterlibatan yang lebih aktif.

Di sisi lain, faktor eksternal mencakup berbagai aspek di luar individu yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat. Faktor ini meliputi peran stakeholder serta ketersediaan kesempatan untuk berpartisipasi. Kesempatan tersebut sangat dipengaruhi oleh pihak penyelenggara program, terutama dalam hal penyediaan akses informasi, transparansi, dan pendampingan. Menurut Asian Development Bank (2021), keterbukaan informasi dan pendekatan yang inklusif dalam perencanaan program merupakan faktor kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor swasta juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan

yang kondusif bagi partisipasi. Kesempatan yang terbuka luas dapat memicu munculnya motivasi, yang selanjutnya berkembang menjadi kemampuan untuk terlibat secara aktif dalam program.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kesiapan individu, tetapi juga oleh dukungan lingkungan yang memadai. Sinergi antara faktor internal dan eksternal menjadi kunci dalam menciptakan partisipasi yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan serta potensi masyarakat setempat.

2.2.5 Partisipasi Masyarakat Pada Program Pemberdayaan Desa

partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan desa. Partisipasi tersebut tidak semata-mata merujuk pada keterlibatan fisik dalam kegiatan pembangunan, melainkan juga mencakup peran aktif komunitas dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi program. Melalui partisipasi yang bermakna, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan bertransformasi menjadi subjek yang turut menentukan arah pembangunan desa mereka.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Mustanir ddk. (2022:47) menyatakan bahwa tingkat partisipasi mencerminkan sejauh mana masyarakat berperan secara sadar, sukarela, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan kegiatan pemberdayaan. Partisipasi yang lahir dari kesadaran kolektif akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan, sehingga memperkuat aspek keberlanjutan pembangunan desa. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat

partisipasi, semakin besar pula peluang terwujudnya kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan.

Widina (2023:52) dalam buku Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik mengklasifikasikan partisipasi masyarakat ke dalam lima tingkatan, yaitu partisipasi pasif, partisipasi konsultatif, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan partisipasi mandiri. Klasifikasi ini menggambarkan perbedaan derajat keterlibatan masyarakat dalam suatu program pemberdayaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Partisipasi Pasif, yaitu kondisi di mana masyarakat hanya berperan sebagai penerima informasi mengenai kegiatan yang akan atau telah dilaksanakan, tanpa dilibatkan dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan. Pada tingkat ini, masyarakat cenderung diposisikan sebagai penerima manfaat tanpa memiliki ruang signifikan untuk menyampaikan aspirasi.
2. Partisipasi Konsultatif, di mana masyarakat mulai dimintai pandangannya melalui forum atau musyawarah, namun keputusan akhir tetap berada di pihak eksternal, seperti pemerintah desa atau pelaksana program. Tingkat ini menunjukkan adanya komunikasi dua arah, meskipun belum mencerminkan kemitraan yang setara.
3. Partisipasi Fungsional, di mana keterlibatan masyarakat menjadi lebih aktif, terutama dalam pelaksanaan kegiatan. Walaupun inisiatif awal masih didominasi oleh pihak luar, masyarakat mulai memanfaatkan sumber daya lokal dan terlibat dalam pelaksanaan teknis kegiatan.

4. Partisipasi Interaktif, di mana masyarakat terlibat secara integral sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program. Proses ini ditandai dengan adanya kemitraan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatnya kesadaran kolektif untuk mencapai tujuan bersama.
5. Partisipasi Mandiri, yaitu tahap tertinggi, di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program pemberdayaan secara otonom. Pada tahap ini, masyarakat bertransformasi menjadi pelaku utama pembangunan yang berdaya dan berorientasi pada kemandirian berkelanjutan.

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkatan partisipasi, semakin besar pula kontrol dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberhasilan program pemberdayaan desa. Pada tingkatan partisipasi yang lebih tinggi (interaktif dan mandiri), masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis yang diarahkan oleh pihak eksternal, tetapi juga sebagai pengambil keputusan strategis yang menentukan arah pembangunan desa. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari model pembangunan top-down menuju pembangunan berbasis partisipasi masyarakat (*bottom-up* atau *partisipatoris*), di mana warga desa memiliki peran dominan dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi setiap program yang dijalankan.Keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan pemberdayaan menciptakan rasa kepemilikan yang kuat terhadap program, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas dan kepedulian terhadap keberlanjutan intervensi pembangunan. Semakin besar kontrol yang dimiliki masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kemandirian mereka dalam

mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi substansial bukan sekadar keterlibatan fisik yang bersifat seremonial, melainkan mencerminkan tumbuhnya kesadaran kritis dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengarahkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan faktual dan nilai-nilai lokal.Oleh karena itu, tingginya partisipasi masyarakat menjadi indikator krusial keberhasilan program pemberdayaan desa karena menunjukkan bahwa proses pembangunan berlangsung secara substantif. Masyarakat yang berpartisipasi aktif tidak hanya mempercepat pencapaian tujuan program, tetapi juga menjamin keberlanjutan hasil pembangunan melalui tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemandirian desa.

Menurut Suharto Edi (2020:94), partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan desa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan, kesadaran sosial, kepercayaan diri, serta motivasi intrinsik masyarakat untuk berpartisipasi. Sedangkan faktor eksternal mencakup dukungan kelembagaan desa, transparansi kebijakan, model kepemimpinan lokal yang partisipatif, serta keterbukaan akses informasi publik. Kelembagaan yang kuat dan kepemimpinan inklusif diyakini dapat menciptakan iklim kolaboratif yang kondusif bagi keterlibatan masyarakat secara aktif.Dalam konteks pembangunan desa di Indonesia, Pramesti et al. (2024:57) menegaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat telah menjadi tolok ukur fundamental keberhasilan implementasi kebijakan Dana Desa. Desa dengan tingkat partisipasi tinggi cenderung menunjukkan efektivitas pelaksanaan program yang lebih baik, karena

keputusan pembangunan yang diambil benar-benar didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat setempat. Partisipasi yang tinggi juga memperkuat rasa memiliki dan meningkatkan akuntabilitas sosial terhadap alokasi serta pemanfaatan anggaran publik di tingkat desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat mencerminkan sejauh mana proses pemberdayaan desa berlangsung secara nyata dan berkelanjutan. Partisipasi yang tinggi mengindikasikan adanya kesadaran, tanggung jawab, serta kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal dan menentukan arah pembangunan desa. Semakin besar keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan program mulai dari perencanaan hingga evaluasi maka semakin kuat pula rasa memiliki, akuntabilitas, serta keberlanjutan hasil pembangunan yang dicapai. Oleh karena itu, keberhasilan program pemberdayaan desa sangat bergantung pada kualitas dan intensitas partisipasi masyarakat di dalamnya.

2.3 Program Pemberdayaan Desa

2.3.1 Pengertian pemberdayaan Desa

Pemberdayaan desa merupakan suatu proses pembangunan yang dirancang secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat desa melalui optimalisasi potensi lokal. Dalam paradigma pembangunan, pemberdayaan menekankan pada pengembangan seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sumber daya manusia, ekonomi, sosial, maupun lingkungan, sehingga masyarakat mampu berkembang secara mandiri (Tulusan & Londa, 2014:94) .

Pemberdayaan masyarakat desa juga merupakan bagian dari paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people-centered*), yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola potensi yang dimilikinya secara mandiri dan berkelanjutan (Tulusan & Londa, 2014:94) .

Lebih lanjut, pemberdayaan desa dapat dipahami sebagai upaya untuk mendorong dan mengembangkan potensi masyarakat melalui tiga dimensi utama, yaitu menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling)*, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*), serta memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat berkembang secara seimbang (*protecting*) (Tulusan & Londa, 2014:99)

Selain itu, pemberdayaan desa juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui peningkatan keterampilan, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan taraf hidupnya serta tidak bergantung pada bantuan pihak lain, melainkan mampu berdiri secara mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki (Tulusan & Londa, 2014:95) .

Dengan demikian, pemberdayaan desa dapat disimpulkan sebagai suatu proses pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi, partisipasi aktif, serta

dukungan berbagai program yang berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

2.3.2 Indikator Pemberdayaan Desa

Indikator pemberdayaan desa merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat desa. Indikator ini penting karena menjadi acuan dalam menilai sejauh mana program pemberdayaan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain sebagai alat evaluasi, indikator pemberdayaan juga berfungsi sebagai pedoman dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program pembangunan desa agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Edi Suharto (2017), pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya, mengambil keputusan, dan menciptakan perubahan dalam kehidupan sosial. Berdasarkan konsep tersebut, indikator pemberdayaan desa dalam penelitian ini meliputi pemanfaatan potensi desa dan kemandirian masyarakat.

1. Pemanfaatan Potensi Desa

Pemanfaatan potensi desa merupakan upaya pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki desa untuk

mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. Potensi desa dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, keterampilan masyarakat, maupun kelembagaan sosial yang berkembang di lingkungan desa. Pemanfaatan potensi desa penting dilakukan agar program pemberdayaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Indikator ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat dan pemerintah desa dalam mengelola potensi lokal, seperti sektor pertanian, kelompok usaha masyarakat, kelompok tani, serta berbagai keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan produktif. Selain itu, pemanfaatan potensi desa juga terlihat melalui pelaksanaan pelatihan, pengembangan usaha, dan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kemandirian Masyarakat

Kemandirian masyarakat merupakan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan potensi diri tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pihak lain. Indikator ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan keterampilan, menjalankan usaha secara mandiri, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan desa. Selain itu, kemandirian juga ditunjukkan melalui perubahan sikap masyarakat yang lebih aktif dalam mencari peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Melalui program pemberdayaan, masyarakat diharapkan tidak hanya menerima bantuan atau pelatihan, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan.

Dengan demikian, indikator pemberdayaan desa dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil pembangunan dari aspek ekonomi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi desa dan meningkatkan kemandirian dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat.

2.3.3 Bentuk Pemberdayaan Desa

Bentuk pemberdayaan desa merujuk pada serangkaian intervensi konkret yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pendekatan yang terpadu dan berkesinambungan. Pemberdayaan tersebut tidak terbatas pada satu sektor tertentu, melainkan mencakup berbagai dimensi kehidupan, termasuk aspek ekonomi, sosial, pendidikan, serta kelembagaan. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat desa mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan (Tampubolon & Seston, 2024:18).

Salah satu bentuk utama pemberdayaan desa terletak pada sektor ekonomi, yang diwujudkan melalui pengembangan aktivitas usaha produktif masyarakat. Implementasi upaya ini dapat berupa penyediaan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan jaringan pemasaran. Melalui pemberdayaan ekonomi, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan taraf pendapatan sekaligus menciptakan peluang kerja secara mandiri (Ardiansyah dkk., 2024:27).

Di samping itu, pemberdayaan desa juga mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia. Bentuk intervensi pada aspek ini meliputi pelatihan keterampilan, pendidikan nonformal, kegiatan penyuluhan,

serta penguatan literasi masyarakat, baik dalam bidang keuangan, digital, maupun kesehatan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan desa (Anshori, 2025:14).

Lebih lanjut, pemberdayaan desa juga diwujudkan melalui penguatan aspek sosial dan budaya yang bertujuan untuk memperkokoh nilai-nilai kolektivitas, seperti gotong royong, solidaritas, serta pelestarian kearifan lokal. Melalui aktivitas sosial dan budaya, masyarakat didorong untuk mempertahankan identitas lokal sekaligus memperkuat kohesi sosial dalam menghadapi dinamika pembangunan (Wulandari, 2024:25).

Selain itu, pemberdayaan desa juga mencakup penguatan kelembagaan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas berbagai lembaga desa, termasuk kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, serta organisasi lokal lainnya agar mampu berperan secara optimal dalam proses pembangunan. Penguatan kelembagaan menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem yang mendukung keberlanjutan program pemberdayaan (Yunantika dkk., 2024:36).

Selanjutnya, pemberdayaan desa juga diimplementasikan melalui pendampingan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pendampingan berfungsi sebagai sarana pemberian bimbingan, motivasi, dan dukungan teknis agar masyarakat mampu mengelola program pemberdayaan secara mandiri. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan pemberdayaan, karena keterlibatan langsung masyarakat

dalam setiap tahapan pembangunan akan memperkuat rasa kepemilikan terhadap program yang dijalankan (Talitha dkk., 2024:11).

Dengan demikian, bentuk pemberdayaan desa mencakup berbagai dimensi yang saling terintegrasi, meliputi pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sosial dan budaya, pengembangan kelembagaan, serta pendampingan dan partisipasi masyarakat. Keseluruhan upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan (Wibowo dkk., 2024:32).